

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PAGENTAN
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	53
BAB V PENUTUP.....	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2014 nomor 244)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213)

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);

27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2025 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2025 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2025;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2025.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan unsur Kewilayahan Bidang Urusan Kecamatan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.171.472.213, dengan fokus utama pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dalam kehidupan berpolitik yang demokratis dan bertanggung jawab. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung tujuan daerah (sebelum adanya penyelarasan tanggal 2 Januari 2024) yang meliputi:

- 1. Meningkatnya kualitas layanan publik.**
- 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;**

Dari 5 program, 12 kegiatan, dan 26 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 2.171.472.213.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 5 program, 12 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.796.373.552,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, tidak ada program kegiatan/subkegiatan yang bertambah anggarannya, sedangkan Program/kegiatan/subkegiatan

yang bekurang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran sebelum perubahan Rp 2.021.022.213,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 1.768.761.506,00 yang terdiri dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran sebelum perubahan Rp 9.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 6.570.000,00 , dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah anggaran sebelum perubahan Rp 2.500.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 2.500.000,00 dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran sebelum perubahan Rp 6.500.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 4.070.000,00, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran sebelum perubahan Rp 1.700.463.416,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 1.496.026.109,00 dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Daerah anggaran sebelum perubahan Rp 1.633.323.416,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 1.427.986.109,00, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD anggaran sebelum perubahan Rp 60.240.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 63.240.000,00, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD anggaran sebelum perubahan Rp 6.900.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 4.800.000,00. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran sebelum perubahan Rp 83.170.300,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 65.900.300,00, terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran sebelum perubahan Rp 8.127.300,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 8.127.300,00, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor anggaran sebelum perubahan Rp 75.043.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 57.773.000,00. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebelum perubahan Rp 42.449.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 30.691.000,00, terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Mebel anggaran sebelum perubahan Rp 7.500.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 3.000.000,00, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya anggaran sebelum

perubahan 34.949.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 27.691.000,00. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran sebelum perubahan 127.999.737,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 117.049.737,00, terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran sebelum perubahan Rp 7.200.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 6.000.000,00, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran sebelum perubahan Rp 120.799.737,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 111.049.737,00. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran sebelum perubahan Rp 57.939.760,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 52.524.360,00, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp 14.987.200,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 13.270.200,00, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebelum perubahan Rp 32.956.760,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 32.956.760,00, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebelum perubahan Rp 9.995.800,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 6.297.400,00.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebelum perubahan Rp 94.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 66.320.000,00 meliputi Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum anggaran sebelum perubahan Rp 20.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 720.000,00 terdiri dari Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran sebelum perubahan Rp 20.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 720.000,00. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat anggaran sebelum perubahan Rp 74.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 65.600.000,00 terdiri dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait

dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha anggaran sebelum perubahan Rp 2.500.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 2.500.000,00, Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan anggaran sebelum perubahan Rp 6.500.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 6.500.000,00, Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan anggaran sebelum perubahan Rp 65.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 56.600.000,00.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan anggaran sebelum perubahan Rp 23.500.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 17.260.000,00 meliputi Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan anggaran sebelum perubahan Rp 20.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 13.760.000,00 terdiri dari Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebelum perubahan Rp 20.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 13.760.000,00. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebelum perubahan Rp 3.500.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 3.500.000,00 terdiri dari Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran sebelum perubahan Rp 3.500.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 3.500.000,00.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebelum perubahan Rp 10.450.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 10.450.000,00 meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah anggaran sebelum perubahan Rp 10.450.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 10.450.000,00 meliputi Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran sebelum perubahan Rp 10.450.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 10.450.000,00.

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebelum perubahan Rp 22.500.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 22.455.000,00 meliputi Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebelum perubahan Rp 22.500.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 22.455.000,00, terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitasi

Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan anggaran sebelum perubahan Rp 3.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 3.000.000,00, Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan anggaran sebelum perubahan Rp 3.500.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 3.500.000,00, Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan anggaran sebelum perubahan Rp 3.500.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 3.500.000,00, Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan anggaran sebelum perubahan Rp 10.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 9.945.000,00, Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebelum perubahan Rp 2.500.000,00 dan anggaran setelah perubahan Rp 2.500.000,00.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2023 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023, tercatat adanya hasil yang baik karena semua target tercapai bahkan ada yang pencapaian melampaui target, hal tersebut dikarenakan adanya komitmen dan integritas yang tinggi dari para aparatur pemerintah kecamatan.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada, semua program/kegiatan/sub kegiatan sesuai target.

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Penyelenggaraan

Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya perencanaan, pelaksanaan, monitoring yang baik.
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2023 keseluruhan pencapaian kinerja telah tercapai sesuai target. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target kinerja ,diantaranya:

1. Koordinasi antar Kasi dan Sub Bagian
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

[illegible]

	Perencanaan, Penganggaran daen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Pelaporan yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	
	Koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 laporan	0 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	5 laporan	
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Persngkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terbayarkan	13 orang	11 orang	12 orang	12 orang	100%	12 orang	12 orang	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	7 orang	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	14 Laporan	0	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	0 paket	3 paket	3 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 paket	13 paket	7 paket	7 paket	100%	8 paket	8 paket	100%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	0 unit	3 unit	3 unit	100 %	4 unit	4 unit	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 unit	0 unit	4 unit	4 unit	100%	50 unit	50 unit	100%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	0 unit	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	4 orang	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan peroranagn dinas atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%	8 unit	8 unit	100%

[illegible]

		dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana								
	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6 dok	0	6 dok	6 dok	100%	6 dok	6 dok	100%
	Tujuan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP								
	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	65,2	29,8	56	63,20	112,85	63,20	63,20	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	32 dokumen	0 dokumen	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	32 dokumen	0 dokumen	0	0	0	0	0	

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13 dokumen	0 dokumen	0	0	0	0	0	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 dok	0 dok	0 dok	0 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	16 desa	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 dokumen	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	16 laporan	0 laporan	0	0	0	0	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dok	6 rumusan	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat dan desa	100	100	100	100	100	100	100	100
	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	2 laporan	16 desa	2 laporan	2 laporan	100%	0 laporan	0 laporan	0
	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTing kat Kecamatan									
	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 lembaga kemasyarakatan	0	1 lembaga kemasyarakatan	1 lembaga kemasyarakatan	100%	1 lembaga kemasya rakatan	1 lembaga kemasyarakatan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 2 Indikator. Dari 2 indikator tersebut berstatus tercapai dan melebihi target yaitu Indikator Nilai IKM Kecamatan pada tahun 2023 tercapai 85,05 atau 102,22% dari target dan Indikator Nilai SAKIP OPD tercapai nilai 63,20 atau 112.85%. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan dokumen perencanaan sehingga data yang disajikan merupakan data yang akuntabel;
3. Koordinasi internal perangkat daerah dengan maksimal sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan yang ada.
4. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
5. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;
6. Komitmen dari para aparatur kecamatan untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun berikutnya, beberapa hal yang harus diupayakan meliputi:

1. Mengevaluasi, menelaah, menyelaraskan dokumen perencanaan agar tercapai target kinerja;
2. Mengevaluasi dan memperbaiki komunikasi serta koordinasi internal perangkat daerah sehingga kegiatan dapat berjalan selaras dengan perencanaan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Setelah penyelarasan)

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai SAKIP Kecamatan			56	63,2	65,2	70,5	29,80	63,20	65	65,2	
2.	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan		-	83,20	85,05	85,90	86	81,23	85,05	85,30	85,90	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/20

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 urusan, yaitu Urusan Kewilayahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2025 mencakup 1 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat
2. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
3. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat, peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
4. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
6. Masih kurangnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
7. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
8. Masih kurangnya sarana dan prasarana.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku

kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat
2. Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas
3. Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan terhadap masyarakat
5. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
6. Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
7. Mudah akses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
8. Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Forkompinca, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2025 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah

keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya tata Kelola pemerintahan. Hal ini ditandai oleh nilai skor SAKIP walau sudah meningkat tetapi masih di nilai 63,20 (B) standar bobot bawah untuk nilai B.
2. Masih lemahnya pemahaman aparaturnya terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
3. Masih tingginya kemiskinan dan pengangguran. Wilayah Pagentan termasuk salah satu kecamatan yang terdapat desa yang masuk kategori Desa miskin ekstrem.
4. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana Gedung kantor baik secara kualitas maupun kuantitas.
5. Bangunan Gedung kantor yang sudah tua dan belum sesuai dengan standar Gedung untuk pelayanan publik, sehingga pelayanan publik belum maksimal.
6. Rawan bencana alam tanah longsor.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2025 meliputi:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan
2. Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik untuk urusan kewilayahan

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara
(Sesuai Berita Acara Penyelarasan tanggal 2 Januari 2024 dan Berita Acara Penetapan Kembali target tanggal 27 Juni 2024)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Tujuan : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Banjarnegara	Nilai SAKIP	B		Tujuan : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Banjarnegara	Nilai SAKIP	B		
I	Sasaran Strategis : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B (65,20)		Sasaran Strategis : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk	kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (72,10)		

						urusan kewilayahan					
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kec pagentan	persenta se terlaksa nanya program pemberd ayaan masyara kat dan desa	100%	10.000.00 0	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	kec pagen tan	persenta se terlaksa nanya program pemberd ayaan masyara kat dan desa	100%	2.000.000	
1.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec Pagentan	Persenta se terlaksan anya Program Pemberd ayaan Masyara kat desa	100%	5.000.000	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec Pagen tan	Persenta se terlaksan anya Program Pemberd ayaan Masyara kat desa	100%	1.000.000	
a.	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec Pagentan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di	2 laporan	5.000.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec Pagen tan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di	2 laporan	1.000.000	

			wilayah kecamatan					wilayah kecamatan			
1.	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	kec pagentan	terseleng garanya pemberd ayaan lembaga kemasya rakatan tingkat kecamatan	100%	5.000.000	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	kec pagen tan	terseleng garanya pemberd ayaan lembaga kemasya rakatan tingkat kecamatan	100%	1.000.000	
a.	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	kec pagentan	Jumlah Laporan pemberd ayaan lembaga kemasya rakatan	1 laporan	5.000.000	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	kec pagen tan	Jumlah Laporan pemberd ayaan lembaga kemasya rakatan	1 laporan	1.000.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	kec pagentan	persenta se Penyele nggaraan n Urusan Pemerin tahan Umum	100%	14.000.00 0	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	kec pagen tan	persenta se Penyele nggaraan n Urusan Pemerin tahan Umum	100%	9.600.000	

1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	kec pagentan	Terselenggara nya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan	100%	14.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	kec pagentan	Terselenggara nya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan	100%	9.600.000	
a.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kec pagentan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	14.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kec pagentan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	9.600.000	

III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	kec pagentan	Persenta se Pembina an dan Pengawa san Pemerin tahan Desa	100%	359.000.0 00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	kec pagen tan	Persenta se Pembina an dan Pengawa san Pemerin tahan Desa	100%	11.000.00 0	
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kec pagentan	Terselen ggaranya Fasilitasi , Rekomen dasi dan Koordina si Pembina an dan Pengawa san Pemerint ahan Desa	100%	359.000.0 00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kec pagen tan	Terselen ggaranya Fasilitasi , Rekomen dasi dan Koordina si Pembina an dan Pengawa san Pemerint ahan Desa	100%	6.000.000	
a.	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	kec pagentan	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusu	32 dokmen	5.000.000	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	kec pagen tan	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusu	32 dokmen	1.000.000	

			nan Program dan Pelaksan aan Pemberd ayaan Masyara kat Desa					nan Program dan Pelaksan aan Pemberd ayaan Masyara kat Desa			
1.b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kec pagentan	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administ rasi Tata Pemerint ahan Desa	16 Dokume n	5.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kec pagen tan	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administ rasi Tata Pemerint ahan Desa	16 Dokume n	1.000.000	
c.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	kec pagentan	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pelaksan aan pemiliha n kepala desa	13 desa	325.000.0 00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	kec pagen tan	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pelaksan aan pemiliha n kepala desa	13 desa	0	
d.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kec pagentan	Jumlah Dokume n yang di	17 dokume n	5.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	kec pagen tan	Jumlah Dokume n yang di	17 dokume n	1.000.000	

			fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Pendayagunaan Aset Desa		fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
e.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	kec pagentan	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	10.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	kec pagentan	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	1.000.000	
f.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kec pagentan	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi	16 dokumen	5.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman	kec pagentan	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi	16 dokumen	1.000.000	

			dalam rangka Penyelen ggaraan Ketenter aman dan Ketertiba n Umum			dan Ketertiban Umum		dalam rangka Penyelen ggaraan Ketenter aman dan Ketertiba n Umum			
g	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Pagentan	Jumlah Dokume n fasilitasi koordinasi pendamp ingan desa di wilayahn ya	16 dokume n	4.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Pagen tan	Jumlah Dokume n fasilitasi koordinasi pendamp ingan desa di wilayahn ya	16 dokume n	1.000.000	
2.	Meningkat Efektivitas Transparasi Layanan Publik	Kec Pagentan	Survey Kepuasa n Masyara kat	85,34		Meningkat nya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik	Kec Pagen tan	Survey Kepuasa n Masyara kat	85,34		
2.	Meningkatny Efektivitas Transparasi Layanan Publik	Kec Pagentan	Survey Kepuas an Masyar akat	85,90		Meningkatn y a Efektivitas dan Transparasi	Kec Pagen tan	Survey Kepuas an Masyar akat	85,90		

	untuk Urusan Kewilayahan		Kecamatan			Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan		Kecamatan			
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	kec pagentan	Persentase Penunjang Urusan Pemerit nahan Daerah Kabupat en yang terlaksa na	100%	12.007.196.947	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	kec pagen tan	Persentase Penunjang Urusan Pemerit nahan Daerah Kabupat en yang terlaksa na	100%	1.986.215.000	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	kec pagentan	terpenuhi nya perencanaan pengang garan dan evaluasi kinerja kecamatan pagentan	100%	5.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	kec pagen tan	terpenuhi nya perencanaan pengang garan dan evaluasi kinerja kecamatan pagentan	100%	2.000.000	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kec pagentan	Jumlah Dokumen perencanaan	8 dokume n	2.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kec pagen tan	Jumlah Dokumen perencanaan	8 dokume n	1.000.000	

			perangka t daerah					perangka t daerah			
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kec pagentan	Jumlah Koordina si dan Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kec pagen tan	Jumlah Koordina si dan Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	1.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kec pagentan	Terselen ggaranya Administ rasi Keuanga n Persngka t Daerah	100%	1.624.696, 947	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kec pagen tan	Terselen ggaranya Administ rasi Keuanga n Persngka t Daerah	100%	1.687.773. 500	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kec pagentan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjanga n ASN	12 orang	1.600.536. 947	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kec pagen tan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjanga n ASN	12 orang	1.665.113. 500	

b	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	kec pagentan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	21.660.000	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	kec pagentan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	21.660.000	
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	kec pagentan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Sem	14 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	kec pagentan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Sem	14 Laporan	1.000.000	

			esteraan SKPD					esteraan SKPD			
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kec pagentan	Terselen ggaranya Administ rasi Umum Perangka t Daerah sesuai ketentua n	100%	130.000.0 00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kec pagen tan	Terselen ggaranya Administ rasi Umum Perangka t Daerah sesuai ketentua n	100%	109.700.7 80	
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kec pagentan	Jumlah Paket Peralata n dan Perlengk apan Kantor yang Disediak an	1 paket	10.000.00 0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kec pagen tan	Jumlah Paket Peralata n dan Perlengk apan Kantor yang Disediak an	1 paket	5.000.000	
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kec pagentan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediak an	8 paket	120.000.0 00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kec pagen tan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediak an	8 paket	104.700.7 80	

4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec pagentan	Tersedia nya Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah	100%	10.065.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec pagen tan	Tersedia nya Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah	100%	34.202.000	
a.	Pengadaan Mebel	kec pagentan	Jumlah Paket Mebel yang Disediak an	2 paket	35.000.000	Pengadaan Mebel	kec pagen tan	Jumlah Paket Mebel yang Disediak an	2 paket	17.984.000	
b.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	kec pagentan	Jumlah paket sarana dan prasaran a penduku ng gedung kantor/b angunan lainnya	3 paket	30.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangu nan lainnya	kec pagen tan	Jumlah paket sarana dan prasaran a penduku ng gedung kantor/b angunan lainnya	3 paket	16.218.000	

c.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Pagentan	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	10.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Pagentan	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	0	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec pagentan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	100%	129.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec pagentan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	100%	115.272.600	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	kec pagentan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 laporan	9.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	kec pagentan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 laporan	4.800.000	

			Listrik yang Disediakan					Listrik yang Disediakan			
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kec pagentan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kec pagentan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	110.472.600	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	kec pagentan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan	100%	53.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	kec pagentan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan	100%	25.632.700	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	kec pagentan	Jumlah Kendaraan Dinas	9 Unit	15.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	kec pagentan	Jumlah Kendaraan Dinas	9 Unit	10.599.000	

	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kec pagentan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kec pagentan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	9.797.900	
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kec pagentan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit	8.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kec pagentan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit	5.235.800	

			yang Dipelihar a/Direha bilitasi					yang Dipelihar a/Direha bilitasi			
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	kec pagentan	Persenta se Penyele nggaraa n Pemerin tahan dan Pelayana n Publik	100%	82.000.00 0	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	kec pagen tan	Persenta se Penyele nggaraa n Pemerin tahan dan Pelayana n Publik	100%	64.485.00	
1.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	kec pagentan	Terselen ggaranya Koordina si Pemeliha raan Sarana dan Prasana Pelayana n Umum	100%	5.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	kec pagen tan	Terselen ggaranya Koordina si Pemeliha raan Sarana dan Prasana Pelayana n Umum	100%	1.000.000	
a.	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	kec pagentan	Jumlah Dokume n Koordina si sinergita s dengan Perangka	6 dokume n	5.000.000	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam	kec pagen tan	Jumlah Dokume n Koordina si sinergita s dengan Perangka	6 dokume n	1.000.000	

			t Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		t Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kec pagentan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	77.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kec pagentan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	63.485.000	
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	kec pagentan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 laporan	8.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	kec pagentan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 laporan	3.600.000	

	Pelayanan Non Perijinan		Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan			dengan Pelayanan Non Perijinan		Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan			
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	kec pagentan	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan.	150 dokumen	4.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	kec pagentan	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan.	150 dokumen	1.000.000	
c.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kec pagentan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 Dokumen	65.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kec pagentan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 Dokumen	58.885.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Memprioritaskan kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2023
2. Memprioritaskan Pengadaan Gedung Kantor Kecamatan Pagentan
3. Melanjutkan kegiatan yang sudah ada di tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Kecamatan Pagentan melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Wanayasa diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Pagentan. Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 dengan Visi “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”. Menengah - Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” adalah meliputi :

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- c. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkna ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, maka RPD Tahun 2023-2026 mempedomani RPJPD Tahun 2005-2025, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah: BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 ini mengarah pada

pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya adalah:

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

Dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Pagentan mempunyai peran dan fungsi menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang

mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pagentan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah Misi Ketiga yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.

Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam Renstra yang mendukung RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 5: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran:

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan

Tujuan 6: Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik

Sasaran:

Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik untuk urusan kewilayahan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pagentan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

(Sesuai Berita Acara Penyelarasan Renstra tanggal 2 Januari 2024 dan Berita Acara Penyesuaian target pada tanggal 27 Juni 2024)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk Urusan Kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	61	CC (56)	B (63,20)	BB (72,10)	BB (70,50)
2	Meningkatnya efektifitas dan transparasi	Meningkatnya efektifitas dan transparasi layanan	Survei kepuasan masyarakat Kecamatan	86	83,20	85,05	85,90	86

	layanan publik	publik untuk Urusan Kewilayaha n						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.3. Program dan Kegiatan
(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD)

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PAGENTAN KAB. BANJARNEGARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PAGENTAN						2.073.300.000,00							3.004.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.073.300.000,00							3.004.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.073.300.000,00							3.004.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.986.215.000,00						-	2.482.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-	-	8.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		4.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		4.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.687.773.500,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-	-	1.868.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1.665.113.500,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		1.800.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	21.660.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		65.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		3.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	121.334.200,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-	-	145.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		15.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	116.334.200,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		130.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	34.202.000,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	17.984.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		50.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Pagentan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Kualitas I nfrastruktur Daerah	-		0,00	KECAMATAN PAGENTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	16.218.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	115.272.600,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	135.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	110.472.600,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		125.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	25.632.700,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	226.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	10.599.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	9.797.900,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	5.235.800,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	64.485.000,00						-	97.500.000,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	1.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Kondusivitas Wilayah	-	-	7.500.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>				6 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Kondusivitas Wilayah	-		7.500.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	63.485.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				150 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>				12 Laporan	3.600.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				1 Laporan	58.885.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		75.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	1.000.000,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Kondusivi tas Wilayah	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Kondusivi tas Wilayah	-		10.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.000.000,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga K emasyarakat an	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		10.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	9.600.000,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	9.600.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Kondusivitas Wilayah	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	9.600.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Kondusivitas Wilayah	-		15.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	11.000.000,00						-	390.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	11.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	390.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				32 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				16 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		10.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		10.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				13 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		325.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		15.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				16 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Kondusivi tas Wilayah	-		10.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				16 Laporan	1.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n Kondusivi tas Wilayah	-		10.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	J U M L A H							2.073.300.000,00							3.004.500.000,00	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di Kecamatan Pagentan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c.2. Penyedia bahan logistik kantor
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Terdapat dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - d.1. Pengadaan Mebel
 - d.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d.3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :

- e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

- f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- f.2. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
- f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :

- a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

- a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

- b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha
- b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
- b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan 2 (dua) kegiatan :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

- a.1. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di

wilayah kecamatan

- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan
 - b.1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 4. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan 1 (satu) kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
 - a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 7 (tujuh) sub Kegiatan :
 - a.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - a.2. Fasilitasi administrasi pemerintahan desa
 - a.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - a.4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
 - a.5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum
 - a.6. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - a.7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara

pada tanggal 10 Juli 2024

GAMAT PAGENTAN



HARI ARUTIBINUKO, SP, M.Si

Pembina Tk. I

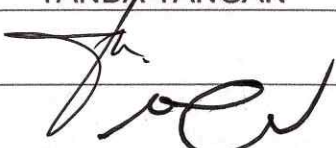
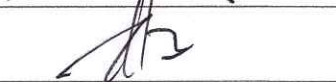
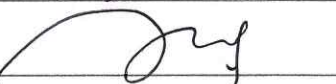
NIP. 196901181996031004

LAMPIRAN

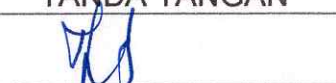
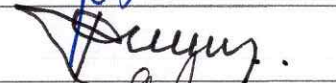
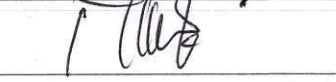
BERITA ACARA HASIL REVIU DOKUMEN PERENCANAAN 2023 - 2026

Pada hari Selasa Tanggal dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilaksanakan Reviu Dokumen Perencanaan 2023-2026 pada Kecamatan Pagentan Kab. Banjarnegara, oleh para pihak sebagai berikut :

1. Tim Reviu Dokumen Perencanaan

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Setya Adi Nugraha, S.IP	Perencana Ahli Madya	Baperlitbang	
2	Fajar Anggun Sawitri, S.STP	Kabid Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial	Baperlitbang	
3	Rifai Azim, ST	Kabid Ekonomi	Inspektorat	
4.	Dede Listantri, SE, MM	PPUPD Ahli Madya	Inspektorat	
5.	Sofyan Yainuri, Psi	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Organisasi	

2. Kecamatan Pagentan

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Hari Arumbinuko, SP, M.Si	Camat	Kecamatan Pagentan	
2	Agung Dwi Antoko, S.Sos	Sekcam	Kecamatan Pagentan	
3	Naeli Mukarromah, S.E.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Pagentan	

3. Hasil Visitasi

Berdasarkan hasil Reviu Dokumen Perencanaan 2023 – 2026 Kecamatan Pagentan Kab. Banjarnegara, dengan hasil sebagai berikut :

No	Dokumen Perencanaan 2023 – 2026							Dokumen Perencanaan 2023 – 2026 Hasil Reviu							
	Komponen	Tujuan / Sasaran / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target				No	Komponen	Tujuan / Sasaran / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target			
				2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026
I.	Tujuan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM					I.	Tujuan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B	B	B	BB
											Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
I.	Sasaran Strategis	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	81,23	83,20	84,30	84,75	I.	Sasaran Strategis	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	CC (56)	B (63,20)	B (65,20)	BB (70,50)
1.	Program	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	100	100	1.	Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100	100	100	100
	Sasaran Program	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							Sasaran Program	terselenggaranya kegiatan pemberdayaan					

										masyarakat desa dan kelurahan					
1.1	Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	1)	Kegiatan	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase koordinasi Pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana	100	100	100	100
	Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat							Sasaran Kegiatan	terselenggaranya koordinasi pemberdayaan desa					
a.	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan pemerintahan	12	12	12	12	a.	Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	0	2	2
	Sasaran Sub Kegiatan	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perijinan							Sasaran sub Kegiatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
b.	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah dokumen Non	200	150	150	150	2)	Kegiatan	Pemberdayaan Lembaga	persentase pemberda	100	100	100	100

[illegible]

	Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							Sasaran Program	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum					
a.	Sub Kegiatan	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6	6	6	6	1)	Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Tugas Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana	100	100	100	100
	Sasaran Sub Kegiatan	Terselenggaranya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan					
2.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	100	a.	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	1	4	4	4

			daerah kabupaten /kota yang terlaksana								di Kecamatan				
	Sasaran Program	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota							Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
2.1	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100	100	100	100	3.	Program	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100	100	100	100
	Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan							Sasaran Program	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
a.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	2	5	5	1)	Kegiatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang	100	100	100	100

											terlaksana				
	Sasaran Sub Kegiatan	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
b.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	7	7	7	7	a.	Sub Kegiatan	Fasilitas Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	32	32	32	32
	Sasaran Sub Kegiatan	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor							Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					
2.2	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	b.	Sub Kegiatan	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9	16	16	16

	Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan							Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
a.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	c.	Sub Kegiatan	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	10	17	17
	Sasaran Sub Kegiatan	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kantor Umum							Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
b.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	d.	Sub Kegiatan	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	3	13	0
	Sasaran Sub Kegiatan	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik							Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan					

										Pemilihan Kepala Desa					
2.3	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100	100	100	100	e.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	1	1	1
	Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan							Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
a.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8	9	9	f.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9	9	16	16
	Sasaran Sub Kegiatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan							Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan					

		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.								Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
b.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	2	3	4	g.	Sub Kegiatan	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	16	16
									Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					
	Sasaran Sub Kegiatan	Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
c.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	10	12	12	II	Tujuan	Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	84,34	85,00	85,34	86,00
	Sasaran Sub Kegiatan	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana						II	Sasaran Strategis	Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	83,20	85,05	85,90	86

		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								untuk Urusan Kewilayahan	Kecamatan				
2.4	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	100	100	100	1.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana	100	100	100	100
	Sasaran Kegiatan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Sasaran Program	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
a.	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	4	4	4	1)	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	100	100	100
	Sasaran Sub Kegiatan	Terpenuhinya Pengadaan Mebel							Sasaran Kegiatan	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

b.	Sub Kegiatan	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	8	50	4	4	a.	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	8	8
	Sasaran Sub Kegiatan	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya							Sasaran Sub Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
c.	Sub Kegiatan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0	0	1	0	b.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	5	5	5	5
	Sasaran Sub Kegiatan	Terpenuhinya pengadaan gedung							Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar					

		kantor atau bangunan lainnya								Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
2.5	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentas e Administ rasi Keuanga n Perangkat Daerah yang terlaksana	100	100	100	100	2)	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentas e Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah yang terlaksan a	100	100	100	100
	Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
a.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	13	15	a.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	13	15
	Sasaran Sub Kegiatan	Terpenuhiya Gaji dan Tunjangan ASN							Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					
b.	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausa haan dan pengujian/ verifikasi	12	12	12	12	b.	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi	12	12	12	12

			keuangan SKPD								Keuangan SKPD				
	Sasaran Sub Kegiatan	Terselenggaranya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD							Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
c.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	14	14	14	c.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	14	14	14
	Sasaran Sub Kegiatan	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD							Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
2.6	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase Perencanaan	100	100	100	100								

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	aan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun												
	Sasaran Kegiatan	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3)	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100	100	100	100
									Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan					
a.	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	8	8	a.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	2	5	5
	Sasaran Sub Kegiatan	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
b.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah laporan capaian	5	5	5	5	b.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan	7	7	7	7

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD								Logistik Kantor yang Disediakan				
	Sasaran Sub Kegiatan	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor					
								4)	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	100	100	100
II.	Tujuan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP						Sasaran Kegiatan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

[illegible]

	Sasaran Kegiatan	terselenggaranya koordinasi pemberdayaan desa						c.	Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	50	4	4
a.	Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	2	0	2	2		Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	Sasaran Sub Kegiatan	terselenggaranya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan						5)	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100
1.2	Kegiatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase pemberdayaan lembaga	100	100	100	100		Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					

			kemasyar akatan tingkat kecamata n							Daerah sesuai ketentuan					
	Sasaran Kegiatan	terselenggaranya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan						a.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12
a.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1	1	1	1		Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Sasaran Sub Kegiatan	terselenggaranya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan						b.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12
2.	Program	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawas	100	100	100	100		Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor					

			an Pemerinta han Desa yang terlaksana												
	Sasaran Program	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						6)	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentas e Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Daerah	100	100	100	100
2.1	Kegiatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentas e Fasilitasi, Rekomen dasi dan Koordinasi Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa yang terlaksana	100	100	100	100		Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan					
	Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						a.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan	8	8	9	9

											Perizinannya				
a.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9	16	16	16		Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Sasaran Sub Kegiatan	Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						b.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	2	3	4
b.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	3	13	0		Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Sasaran Sub Kegiatan	Terselenggaranya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa						c.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	10	10	12	12

[illegible]

	Sasaran Sub Kegiatan	Terselenggaranya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							Sasaran Program	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
e.	Sub Kegiatan	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang di Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9	9	9	9	1)	Kegiatan	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	100	100	100	100
	Sasaran Sub Kegiatan	Terselenggaranya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum					
f.	Sub Kegiatan	fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitas dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	32	32	32	32	a.	Sub Kegiatan	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi /sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana	6	6	6	6

											dan Prasarana Pelayanan Umum				
	Sasaran Sub Kegiatan	Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					
g.	Sub Kegiatan	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampi ngan Desa di wilayahny a	0	0	1	1	2)	Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentas e Pelaksan aan Urusan Pemerint ahan yang Dilimpahk an kepada Camat	100	100	100	100
	Sasaran Sub Kegiatan	Terselenggaranya fasilitasi koordinasi pendampingan desa di wilayahnya							Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					
3.	Program	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentas e Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum yang terlaksana	100	100	100	100	a.	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanak an	200	150	150	150

	Sasaran Program	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum							Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					
3.1	Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana	100	100	100	100	b.	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12	12	12	12
	Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan							Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan					
a.	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	4	4	4	c.	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1	1	1	1
	Sasaran Sub Kegiatan	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi							Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang					



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PAGENTAN

Alamat Jln. Raya Pagentan Nomor 82 Kode Pos 53455

Pagentan, 26 Juni 2024

Nomor : 005/ 227.1 /kecpgt/2024
Lamp : -
Hal : Undangan Rapat Evaluasi
Pengukuran Kinerja TW II

Kepada
Yth. Sekcam, Kasi, Kasubag
dan Segenap Staf
di

Tempat

Dalam rangka tertib penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dengan ini mohon kehadiran Saudara dalam acara Rapat Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan II yang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari, tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Tempat : Rumah Dinas Camat Pagentan
Waktu : Pukul 08.00 s.d. selesai
Keterangan : Membawa Data Capaian Kinerja sampai dengan triwulan II.

Demikian untuk menjadi perhatian.



CAMAT PAGENTAN

HARI ARUMBINUKO, SP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196901181996031004



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PAGENTAN

Alamat Jln. Raya Pagentan Nomor 82 Kode Pos 53455

NOTULEN

Rapat : Rapat Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan II
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Waktu Rapat : Pukul 08.00 s.d. selesai
Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan/evaluasi
3. Penutup
Peserta Rapat : 1. Camat Pagentan
2. Sekcam Pagentan
3. Kasi dan Kasubag
4. Fungsional Umum

Kegiatan Rapat :

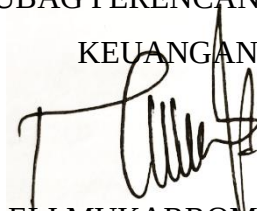
1. Rapat dibuka dengan bacaan Basmallah
2. Pembahasan Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2024 tiap Program/kegiatan yang dimulai pada pukul 08.30 Wib s.d. selesai.

Pembahasan :

- a. Membahas Realisasi Capaian Kinerja yang telah dilakukan untuk tiap program, kegiatan dan sub kegiatan dan kesesuaian antara target dan realisasi yang dicapai disesuaikan dengan target dan waktu pelaksanaan kegiatan.
 - 1) Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan dan 14 sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi kinerja sebesar 43,4% dari target sebesar 62% dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 70% dan realisasi anggaran Rp 922.786.832,-.
 - 2) Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi kinerja sebesar 63,06% dari target sebesar 60% dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 105,1 % dan realisasi anggaran Rp 1.500.000,-.
 - 3) Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi kinerja sebesar 50% dari target sebesar 50% dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 100 % dan realisasi anggaran Rp 0,- (Program ini tidak terdani) dalam DPA.
 - 4) Untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi kinerja sebesar 50% dari target sebesar 50% dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 100 % dan realisasi anggaran Rp 0,-.

- 5) Untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi kinerja sebesar 67% dari target sebesar 67% dengan Tingkat capaian kinerja sebesar 100 % dan realisasi anggaran Rp 60.278.200,-.
- b. Sebagai tindak lanjut dari rapat evaluasi pengukuran kinerja triwulan II diharapkan untuk setiap kegiatan pada triwulan III dilaksanakan sesuai target dan rencana, untuk target yang tidak tercapai di triwulan II agar dievaluasi apa saja yang menjadi hambatan dan kendala. Diharapkan di triwulan II semua target tercapai sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian realisasi kinerja dapat tercapai 100% pada akhir tahun. Realisasi Keuangan masih rendah, diakibatkan adanya kendala di proses pemaketan barang dan jasa di E-katalog. Kepada PPK di minta untuk segera berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang/jasa sehingga di triwulan III tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
- c. Sesuai dengan Hasil dari Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Nomor 700/45/LHE/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pagentan Tahun 2023 memperoleh hasil penilaian sebesar BB (72,10). Oleh sebab itu, perlu adanya penetapan ulang target kinerja pada tahun 2025 yaitu sebesar BB (72,10) sesuai dengan target minimal perolehan tahun sebelumnya. Target kinerja untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2025 dalam Berita Acara Penyelarasan Renstra Tanggal 2 Januari 2024 sebesar B (65,20).
3. Rapat ditutup dengan bacaan Hamdallah bersama-sama.

KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN



NAELI MUKARROMAH, S.E.
Penata Muda
NIP. 199008012011012001





PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PAGENTAN

Alamat: Jln. Raya Pagentan Nomor 82 Kode Pos 53455

BERITA ACARA
PENETAPAN TARGET KINERJA TAHUN 2025
INDIKATOR NILAI SAKIP KECAMATAN

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat, telah dilaksanakan penyesuaian Kembali target kinerja tahun 2025 untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan. Dalam Berita Acara Penyelarasan tanggal 2 Januari 2024 tertulis B (65,20). Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pagentan Tahun 2023 memperoleh hasil penilaian sebesar BB (72,10). Sehingga ditetapkan Target Kinerja Tahun 2025 untuk Indikator Nilai SAKIP Kecamatan sebesar BB (72,10).

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagentan, 27 Juni 2024

CAMAT PAGENTAN

HARI ARUMBINUKO, SP,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196901181996031004

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : KAMIS
Tanggal : 27 JUNI 2024
Acara : Rapat Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HARI ARUMBINUKO, SP, M.Si	CAMAT	1
2	AGUNG DWI ANTOKO, S.Sos	SEKCAM	2
3	ARIES SETYAWAN, SH	KASI PMD	3
4	IWAN WIDIYANTO, SE	KASI TAPEM	4
5	VIDYASARI NOVEN A.,S.STP	KASI KESRA	5
6	ENDRO NURHARGONO, SE	KASI TRANTIB	6
7	NAELI MUKARROMAH, SE	KASUBAG PK	7
8	SRI HANDAYANI RAHAYU	KASUBAG UMPEG	8
9	RATNA DEWI K.,A.Md	BENDAHARA	9
10	HERU BEKTI IRAWAN, S.IP	PENGELOLA PMD	10
11	ISMAWAN CAHYADI, SH	PTT	11
12	HUFFRON ABDULLOH	THL	12



CAMAT PAGENTAN
HARI ARUMBINUKO, SP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196901181996031004